

Judul : Perlu peraturan darurat lindungi data pribadi
Tanggal : Sabtu, 08 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Perlu Peraturan Darurat Lindungi Data Pribadi

Tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap standar keamanan data masih belum tinggi, tetapi tidak ada sanksi tegas.

SRI UTAMI
amu@mediaindonesia.com

KEBOCORAN data yang lagi lagi terjadi akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Perlu peraturan darurat karena meski UU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah diundangkan pada Oktober 2022, tetapi ada masa transisi dua tahun.

Kebocoran terkini terjadi pada 34 juta data paspor Indonesia. Kabar itu pertama kali dibagikan oleh praktisi keamanan siber, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di *Twitter*. Dia memaparkan, data paspor yang diretas *Bjorka* pada Juli 2023 itu di antaranya nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengkhawatirkan hal tersebut karena keamanan data pribadi yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaganya begitu mudah bocor. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan undang-undang yang berhubungan dengan dunia digital, yaitu UU ITE jarang

dipergunakan untuk menindak tegas kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia digital," ujarnya, kemarin.

Pemerintah, imbuh Sukamta, harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU PDP. Tujuannya selain untuk mencegah dan sebagai dasar hukum penindakan kasus kebocoran data, juga mendorong pengelola data menyiapkan sistem dan infrastruktur. "Ketika data bobol, pemilik data paling dirugikan, sedang kan pengelola membiarkan kejadian berulang."

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan UU PDP belum bisa efektif karena masih masa sosialisasi serta memberi waktu pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah dan aturan teknis dan juklak. Menurutnya, tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap standar keamanan data masih belum tinggi, tetapi tidak ada sanksi tegas.

Pakar IT Hariqo Wihawa Satria menilai pemerintah belum memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap serangan siber atau perang siber sehingga langkah pengamanan dan pencegahan tidak bisa memberikan perlindungan maksimal. "Sebetulnya ini sudah perang siber. Serangan siber ini masuk ranah pertahanan. Jadi,

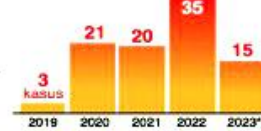
Kasus Kebocoran Data Paspor

- Data dibobol pada Juli 2023.
- Sebanyak 34 juta data paspor diduga dibocorkan dan diperjualbelikan.
- Pelaku diduga ialah peretas *Bjorka*.
- Data informasi yang bocor ialah nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
- Terdapat informasi mengenai kapasitas data *compressed and uncompressed* sebesar 4GB, jumlah data sebesar 34.900.867 dengan format CSV.

• Data tersebut dijual seharga US\$10 ribu atau sekitar Rp150 juta.

• Temuan sementara ada perbedaan struktur data antara data di Pusat Data Nasional dengan yang beredar.

Kasus Kebocoran Data di Indonesia



*hingga Juni

Sumber: Kominfo/LiBang MI

lebih pada militer. Artinya, bukan BSSN, melainkan TNI yang harus menambah mata lagi," ujarnya.

Menurut dia, pemahaman terhadap serangan siber tidak segenting dengan ancaman perampasan pulau atau budaya oleh negara lain. Situasi ini disebutnya sebagai *mindset* tua sehingga lemah dalam pencegahan.

Benahi pengelolaan

Pakar keamanan siber dan forensik digital, Alfons Tanujaya, mengatakan data paspor yang bocor itu mengandung informasi yang hanya dimiliki oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seperti nomor paspor dan nomor induk keimigrasian atau nikim. Nikim merupakan identitas digital yang digunakan untuk pengamanan paspor elektronik.

Alfons mendorong Ditjen Imigrasi membenahi pengelolaan data. Di samping itu,

investigasi pascakebocoran 34 juta paspor WNI juga harus dilakukan dengan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menyampaikannya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut. Dia mengimbau seluruh penyelenggara sistem elektronik, pengendali data pribadi, dan subjek data pribadi meningkatkan keamanan data dan sistem elektronik yang dioperasikan.

Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM, Silmi Karim, mengatakan data yang mereka miliki aman dan tidak ada kebocoran data. Dia meminta BSSN untuk menyelidiki kepastian kebocoran data tersebut. "Yang saya bisa pastikan saat ini data biometrik aman." (Tri/Rif/X-4)

“KPK mungkin merasa kasus Harun seperti kerikil dalam sepatu: kecil tapi mengganggu. Namun, publik dan para aktivis antikorupsi melihat kasus itu sebagai duri dalam daging yang tidak kunjung bisa dicabut.**”**

Podium | Hlm 2



“Kemungkinan ada terjadi kekosongan. Pemerintah harus menyiapkan lebih awal untuk penjabatnya supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu.**”**

Ma'ruf Amin
Wakil Presiden

Podium 2024 | Hlm 3